



KR-Sukro Riyadi

CABAI LUAR MUSIM: Petani menyiram tanaman cabai di lahan pasir Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, DIY, Kamis (3/2). Di kawasan tersebut kini tengah dikembangkan komoditas cabai di luar musim atau 'off season' selalu tiga hektare lebih dengan harapan mendapatkan harga jual tinggi.

KEPALA BMKG MINTA PT AP I

Perbanyak Rambu Tsunami-Gempa di YIA

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta PT Angkasa Pura (AP) I memperbanyak rambu peringatan bencana dan petunjuk jalur evakuasi di Yogyakarta International Airport/Bandara Internasional Yogyakarta (YIA/BIY) di Kulonprogo, DIY.

Langkah ini sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana alam dan menjadikan penumpang lebih siap, mengingat kawasan YIA merupakan kawasan rawan gempa bumi dan tsunami. "Semakin banyak rambu, maka semakin baik. Orang bingung kalau bencana tidak jelas lokasi evakuasinya, karena tidak ada tanda atau rambu," kata Dwikorita seperti diwartakan Antara di Jakarta, Kamis (3/2).

Dwikorita menyebut bangunan Yogyakarta International Airport didesain tahan gempa hingga 8,8

magnitudo dan tsunami setinggi 12 meter.

Dwikorita sewaktu mengunjungi YIA pada Senin (31/1), mengingatkan pengelola terkait pentingnya rambu tanda evakuasi yang jelas dan mudah dipahami pengguna bandara. Disebutkan, jika tanda atau rambu-rambu yang terpasang tidak jelas, maka ketika terjadi bencana gempa bumi atau tsunami, pengguna bandara akan panik dan bukan tidak mungkin berada di lokasi evakuasi yang salah.

Hal yang tidak kalah penting diingatkan Kepala BMKG, yaitu ti-

ti kumpul evakuasi harus benar-benar aman dan memadai sehingga tidak terjadi kepadatan. Jalur menuju titik evakuasi juga sebaiknya tak menciptakan efek sumbatan leher botol (bottle neck) yang bisa membuat kepadatan orang secara berlebih pada satu titik.

"Seluruh kawasan bandara sebaiknya memang ada rambu, termasuk di dalam area dalam ruangan atau terminal tunggu penumpang dan juga di luar gedung bandara. Tinggal sesuaikan saja dengan dekorasinya, yang penting rambu tersebut harus jelas dan gampang terlihat semua pengguna bandara," kata Dwikorita.

Dwikorita menerangkan, ada perbedaan rambu evakuasi antara kebakaran dan tsunami. Jika terjadi kebakaran, seluruh pengguna bandara diminta untuk berlari keluar, namun sebaliknya jika ter-

jadi tsunami maka pengguna bandara harus masuk ke dalam gedung dan naik ke atas ke Lantai Mezanin dan Lantai 2 gedung.

Airport Safety Risk and Performance Management Senior Manager YIA R Bambang Triyono mengatakan, pihaknya sudah memasang sejumlah rambu evakuasi. Beberapa rambu, berada di dalam maupun di luar gedung. Kendati begitu, pengelola YIA akan menambahkan sejumlah rambu, terutama terkait evakuasi tsunami, karena memang rambu yang sudah ada saat ini adalah rambu untuk kebakaran atau kedaruratan selain tsunami. Pihaknya menerima masukan dari Kepala BMKG untuk meningkatkan rambu evakuasi, terutama di titik-titik yang telah terpasang rambu evakuasi kebakaran, gempa serta sejumlah titik kumpul. (San)-f

SEBUT JUMLAH PESANTREN TERAFILIASI TERORIS Permintaan Maaf BNPT Diapresiasi

JAKARTA (KR) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta maaf terkait daftar pesantren terafiliasi jaringan terorisme. Permintaan maaf itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (3/2) di kantor MUI Jakarta.

Setelah berdiskusi sekitar dua jam dengan berbagai masukan, kritik dan saran yang disampaikan di antara kedua belah pihak, Boy Rafli Amar menyampaikan permohonan maaf tersebut. Ia tanpa ragu menyatakan minta maaf kepada pesantren dan semua pihak yang merasa tersinggung serta tersakiti dengan rilis daftar pesantren yang terafiliasi terorisme.

Boy juga menyampaikan, BNPT tidak akan sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat serta berpotensi menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam beserta seluruh umat Muslim. Komitmen pembenahan juga akan dilakukan BNPT terkait dengan pembuatan kriteria dan indikator kelompok terorisme.

Menanggapi permintaan maaf BNPT

itu, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zaenudin mengatakan, pihaknya mengapresiasi positif permintaan maaf tersebut. "Tentunya, kami sangat gembira sekaligus mengapresiasi sikap terbuka, gentle, dan rendah hati dari Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar," kata KH Jeje Zaenudin dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir Antara, kemarin.

"Saya kira, ini suatu kemajuan luar biasa yang dilakukan oleh BNPT. Mereka menerima semua masukan, kritikan, saran, dan keluh kesah umat yang disampaikan para pimpinan MUI berkenaan dengan kriteria-kriteria kelompok terorisme yang terkesan menyudutkan kelompok Muslim," kata Jeje Zaenudin.

Dalam acara silaturahmi dan dialog itu, ikut pula hadir seluruh deputi BNPT, Ketua MUI Pusat KH Dr Chalil Nafis, Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundangan Prof Dr Noor Achmad, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Dr Asrarun Ni'am, dan Ketua MUI Bidang Pengajian, Penelitian, dan Pengembangan Prof Dr Utang Ranuwijaya. (Obi)-f

Gejala Ringan Omicron Tak Berlaku untuk Lansia

JAKARTA (KR) - Gejala ringan varian Omicron tidak berlaku untuk lansia. Karena itu sebaiknya lansia tidak meremehkan Omicron yang gejalanya dianggap ringan, sebab hal ini tidak berlaku bagi lansia. Penyakit yang ditimbulkan oleh Omicron memang lebih ringan daripada Delta. Namun hal ini perlu diwaspadai, sebab gejala ringan terjadi pada kelompok mereka yang sehat dan muda.

"Untuk kelompok tertentu, seperti orang lanjut usia, anak-anak balita yang belum divaksin, orang dengan komorbid atau penyakit bawaan yang kronis dan tidak terkendali, akan mengalami gejala berat sehingga perlu dirawat di rumah sakit," ujar dokter spesialis penyakit paru dari RSUP Persahabatan Jakarta Erlina Burhan dalam Webinar 'Jangan Lengah, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh untuk Mencegah Penularan Covid-19' di Jakarta, Kamis (3/2).

Menurut Erlina Burhan, dengan sistem imun yang turun, orang-orang dengan kelompok tersebut dapat mudah tertular, apalagi jika lansia dengan komorbid belum divaksinasi. "Jangan terlalu meremehkan, karena ada kelompok-kelompok yang rentan yang harus kita lindungi," ujar Erlina. Dikatakan, saat ini kasus Covid-19 semakin meningkat, penambahan kasus harian per 30 Januari 2022 mencapai 12.442 orang. (Afi)-d

Daerah PPKM Level 2 PTM 50%

JAKARTA (KR) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan jumlah peserta 50% dari kapasitas ruangan. "Saya sudah menerbitkan edaran baru. PTM Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang pada satuan pendidikan di daerah PPKM level 2," terang Menag di Jakarta, Rabu (3/2).

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 03 tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Menag, edaran tertanggal 3 Februari 2022 ini terbit sebagai panduan yang mengatur diskresi pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri. Diskresi diberikan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus penularan Covid-19. Pemberian diskresi ini juga sudah menjadi kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Untuk pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan di daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama 4 Menteri," tutur Menag. (Afi)-d

Kasus E-KTP, KPK Tahan 2 Tersangka

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP). Bahkan, kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam kasus tersebut KPK telah menahan dua tersangka.

Kedua tersangka itu adalah mantan Dirut Perum Percetakan Negara RI (PN-RI) Isnun Edhi Wijaya (ISE) dan mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)/Ketua Tim Teknis Teknologi Husni Fahmi (HSF).

"Kepada dua tersangka dilakulan penahanan untuk kepentingan penyidikan," kata Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Kamis (3/2). Untuk tersangka ISE dan HSF, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung 3 Februari sampai 22 Februari 2022. Kedua tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Lili Pintauli mengungkapkan, pada Agustus 2019 telah mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pe-

ngembangan kasus korupsi e-KTP. Adapun dua tersangka lainnya, yakni Anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S Haryani (MSH), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS).

KPK, kata Lili, menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terkait kasus e-KTP tersebut sekitar Rp 2,3 triliun. Tersangka Isnun dan Husni disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lili mengatakan, pengadaan e-KTP merupakan salah satu proyek penting Pemerintah yang membutuhkan dana besar guna melakukan perbaikan administrasi kependudukan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Untuk itu, tegas Lili, pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proyek ini seharusnya memegang teguh amanah rakyat dan mengerjakannya dengan penuh integritas. "Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak jujur," tandasnya. (Ful)-f

HARGA MINYAK GORENG Diupayakan Tak Tergantung CPO Dunia

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, Pemerintah tengah mengupayakan agar harga minyak goreng dalam negeri tidak lagi bergantung pada harga Crude Palm Oil (CPO) internasional.

"Jadi penyebab utama yang harus diperbaiki adalah harga minyak goreng domestik melepaskan diri dari ketergantungan harga CPO internasional. Silakan (harga CPO) naik berapa pun, itu berkah bagi eksportir kita," kata Oke dalam diskusi publik Institut for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual, Kamis (3/2).

Hal tersebut disampaikan terkait melambungnya harga minyak goreng di dalam negeri ketika harga CPO internasional melonjak tinggi, padahal Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.

Oke memaparkan, Pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan. Dengan demikian pada situasi tertentu yakni ketika datangnya pandemi Covid-19, baru disadari kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan.

"Pemerintah yang selama ini *adhem ayem*, ternyata harga minyak goreng domestik tidak boleh ketergantungan dengan harga CPO internasional. Dan posisinya saat ini tidak bisa menunggu lama, harus segera ditindaklanjuti," ujar Oke seperti dikutip Antara. (San)-f

PEMBAHASAN RUU TPKS

Pemerintah Jamin Libatkan Warga Sipil

JAKARTA (KR) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, pemerintah menjamin keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (3/2) mengatakan, pemerintah ingin menghadirkan asas keterbukaan dalam pengembangan substansi RUU TPKS yang melibatkan perspektif dan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, setelah mengadakan konsinyasi selama tiga hari untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS, pemerintah membuka konsultasi publik bersama masyarakat sipil dan para akademisi.

"Kehadiran rekan-rekan masyarakat sipil yang terlibat secara aktif untuk berkontribusi dalam menyusun substansi RUU TPKS adalah suatu legacy ke depan," ujar Moeldoko dalam konsultasi publik yang diadakan secara hibrida di Jakarta, kemarin.

Konsultasi publik tersebut dihadiri Kementerian/lembaga terkait serta lebih dari 80 perwakilan masyarakat sipil dan aka-

demisi yang tergabung secara langsung dan virtual.

Moeldoko menerangkan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk merespons keadaan darurat kekerasan seksual di Indonesia.

Mengutip data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2020 hingga Juni 2021 tercatat 301.878 kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Kolaborasi semua pihak wajib dalam mendukung dan menyempurnakan RUU TPKS karena kedaruratan kekerasan seksual tidak sekadar angka, melainkan daya rusakny terhadap fisik dan psikis korban perlu menjadi perhatian serius kita semua," papar Moeldoko.

Pihaknya menekankan, pemerintah dalam menyusun DIM turut mempertimbangkan garis besar konstruksi hukum pidana Indonesia. Ia memastikan seluruh kementerian/lembaga terkait sudah mengkaji dan menysisir peraturan perundang-undangan agar RUU TPKS tidak tumpang tindih dan tidak menjadi repetisi serta berdiri menjadi norma hukum yang baru. (Sim/Ant)-f

ERA DIGITAL BUKAN ERA INSTAN

UMKM Dituntut Mengenal Literasi Digital

YOGYA (KR) - Era digital bukan merupakan era instan dan menjadikan sesuatu menjadi mudah, hingga umpamanya uang Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta hanya dengan *thenguk-thenguk*, tanpa berbuat apa-apa. Namun era ini UMKM dituntut kerja keras, mengenal literasi digital. Dan peran kreativitas dan inovasi sangat berperan di era digital seperti sekarang.

Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah Herry Zudianto SE Akt MM mengemukakan pada media usai penandatanganan kerja sama dengan Startup Sosial Commerce Evermos, Kamis (3/2) siang. Penandatanganan dilakukan Ketua MEK PP Muhammadiyah Herry Zudianto dengan CEO dan

co-founder Evermos Ghufron Mustaqim.

Herry mengakui, tugas literasi digital banyak. Dalam hal perdagangan diakui masih banyak yang tergelincir ke hal-hal negatif. Dan realita ini disebut Ketua MEK PP Muhammadiyah masih ada bangsa

kita yang terjebak dan senang budaya instan. "Literasi digital harus menjadi bagian tugas kita untuk mengingatkan jebakan batman dalam perdagangan di era digital ini. Kalau bisa menghindari budaya instan, rasionalitas kita akan berjalan. Dan masuk

fase perdagangan digital perlu mempelajari dan memahami dulu literasi digital," sebutnya.

MEK PP Muhammadiyah berperan mensosialisasikan program kerja sama ini sehingga dapat dimanfaatkan semua anggota Muhammadiyah untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Dengan Evermos menurutnya, MEK PP Muhammadiyah akan dapat secara efektif mengembangkan jaringan pengusaha yang dikenal sebagai Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) melalui seluruh tingkatan Persyarikatan Muhammadiyah.

"Sebagai pengusaha, saya juga telah memasukkan satu unit produksi saya ke dalam ekosistem Evermos," ungkap Herry. (Fsy)-f



KR-Fadmi Susiwi

Penandatanganan naskah kerja sama MEK PP Muhammadiyah dengan Evermos.